



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2024 – 2025
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 3 Februari 2025
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: - Evaluasi Kinerja Kementerian Dalam Negeri dan BNPP Tahun 2024; - Program Kerja Kementerian Dalam Negeri dan BNPP Tahun 2025; - Pandangan Menteri Dalam Negeri terhadap rencana penataan sistem politik dan pemilu di Indonesia.
Ketua Rapat	: Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H./Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A 21 (dua puluh satu) Anggota Komisi II DPR RI dari 41 (empat puluh satu) Anggota Komisi II DPR RI/8 (delapan) fraksi dari 8 (delapan) fraksi B Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia C Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan

I. PENDAHULUAN

a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan terkait Evaluasi Kinerja Kementerian Dalam Negeri dan BNPP Tahun 2024, Program Kerja Kementerian Dalam Negeri dan BNPP Tahun 2025 dan Pandangan Menteri Dalam Negeri terhadap rencana penataan sistem politik dan pemilu di Indonesia dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp5.021.069.637.329,- (lima triliun dua puluh satu miliar enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp5.205.771.827.000,- (lima triliun dua ratus lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau sebesar 96,45%.

2. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) atas capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp231.636.430.603,- (dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp236.349.314.000,- (dua ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) atau sebesar 98,01%.

3. Komisi II DPR RI menerima hasil tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sehingga terdapat efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun 2025 pada:

a. Pagu Anggaran Kemendagri Tahun 2025 menjadi sebesar Rp2.038.635.518.000,- (dua triliun tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) atau efisiensi sebesar 57,46% dari total pagu alokasi anggaran Kemendagri Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp4.792.328.518.000,- (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

b. Pagu Anggaran BNPP Tahun 2025 menjadi sebesar Rp150.800.000.000,- (seratus lima puluh miliar delapan ratus juta rupiah) atau efisiensi sebesar 56,4 % dari total pagu alokasi anggaran BNPP Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp267.135.531.000,- (dua ratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

4. Komisi II DPR RI menerima hasil tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 sehingga Alokasi Anggaran Kemendagri Tahun 2025 menjadi sebesar Rp2.038.635.518.000,- (Dua Trilyun Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) dari total Pagu sebelumnya sebesar Rp4.792.328.518.000,- (Empat Trilyun Tujuh Ratus Sembiliah Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima

Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), atau efisiensi 57,46% dan Alokasi Anggaran BNPP Tahun 2025 sebesar Rp150.800.000.000,- (Seratus Lima Puluh Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dari total Pagu sebelumnya sebesar Rp267.135.531.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) atau efisiensi sebesar 56,4 %.

5. Komisi II DPR RI meminta Kemendagri mendorong program Transformasi Digital dan Administrasi Kependudukan, sehingga tidak ada lagi kesenjangan digital di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) yang membuat implementasi digitalisasi pemerintahan (e-gov) berjalan merata. Sehingga Kemendagri perlu meningkatkan kapasitas aparatur SDM pemerintahan di berbagai daerah termasuk daerah 3T agar mereka mampu mengoperasikan sistem digital secara optimal.

6. Komisi II DPR RI meminta Kemendagri untuk memperhatikan pembangunan di wilayah perbatasan yang disertai dengan memperkuat kapasitas SDM dan ekonomi lokal sehingga program BNPP akan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

7. Komisi II DPR meminta Kemendagri untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada 4 (empat) Provinsi baru daerah hasil pemekaran di Tanah Papua mulai dari pembangunan infrastruktur kantor pemerintahan, pengisian SDM ASN, serah terima aset daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga proses penganggaran sampai terbentuknya Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.59 WIB.

Jakarta, 30 Januari 2025

KETUA RAPAT


Dr. H. M. RIFQINIZAMY KARSAYUDA, S.H., M.H.

A-416